



Jakarta, 14 Juni 2021

## PROGRAM PC-PEN DAN SATU TAHUN PANDEMI Perspektif Akuntabilitas dan Pengawasan Keuangan

### Pesan Kunci

- Dampak Pandemi Covid-19 menimbulkan permasalahan pada sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi.
- Upaya Pemerintah memutus penularan Covid-19 melalui pembatasan mobilitas individu dengan istilah PSBB dan PPKM Mikro diyakini memberi dampak pada pelemahan aktivitas ekonomi.
- Mitigasi dampak pandemi Covid-19 dibidang kesehatan, sosial, dan ekonomi yang dilakukan Pemerintah melalui kebijakan PC-PEN di tahun 2020 telah menghabiskan anggaran sebesar Rp579,78 triliun atau 83,4 persen dari rencana sebesar Rp695,2 triliun.
- Namun dalam pelaksanaannya, program PC-PEN dibidang kesehatan dinilai kurang efektif untuk menekan jumlah kasus Covid-19. Begitupun dibidang ekonomi, program PC-PEN dinilai belum efektif untuk memperluas ruang aktivitas investasi dan ekspor.
- Tinjauan dari perspektif tata kelola keuangan negara menunjukkan permasalahan atas akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada program PC-PEN TA 2020.
- Oleh karena itu, harmonisasi kebijakan dan sosialisasi pelaksanaan PC-PEN menjadi niscaya untuk mendapat perhatian dan prioritas utama yang disertai *sense of crisis* dalam penanganannya di masa mendatang.

### Penanggungjawab:

Helmizar

### Ketua:

Faqih Nur Huda

### Anggota:

Eko Adityo Ananto, Sekar Aditya Dwikiranana, Teuku Surya Darma, Hafiz Dwi Putra, Agam Noor Syahbana

### Isu Strategis

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 lalu di seluruh dunia (tidak terkecuali di Indonesia) bukan hanya menjadi permasalahan kesehatan, namun juga berdampak serius yang menimbulkan permasalahan pada sektor sosial dan ekonomi. Permasalahan kesehatan telah mengakibatkan meningkatnya total kasus terkonfirmasi Covid-19 hingga 14 Juni 2021 mencapai 1.919.547 kasus dengan jumlah meninggal sebanyak 53.116 jiwa.

Sedangkan permasalahan ekonomi yang timbul adalah pelemahan pada hampir keseluruhan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) yang diantaranya merupakan dampak dari kebijakan pembatasan mobilitas sosial seperti PSBB maupun PPKM Mikro sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar minus 2,07 persen ditahun 2020. Selanjutnya, permasalahan ekonomi tersebut juga menimbulkan dampak turunan pada sektor sosial, seperti meningkatnya persentase masyarakat miskin mencapai 10,19 persen (atau kembali menembus dua digit) pada September 2020 yang sebelumnya hanya sebesar sebesar 9,78 persen pada Maret 2020.

Upaya mitigasi terhadap permasalahan kesehatan, sosial dan ekonomi yang timbul sebagai dampak pandemi dilakukan Pemerintah dengan menetapkan kebijakan Belanja Negara yang diarahkan untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sebagaimana diatur dalam UU No.2 Tahun 2020 dan aturan pelaksanaannya pada PP No.23 Tahun 2020 yang telah diubah menjadi PP No.43 Tahun 2020. Dukungan Belanja Negara yang dilakukan Pemerintah terhadap program PC-PEN ditahun 2020 adalah melalui alokasi anggaran sebesar Rp695,2 triliun dengan realisasi sebesar Rp579,78 triliun (83,4 persen). Sedangkan ditahun 2021, Pemerintah meningkatkan anggaran untuk Program PC-PEN mencapai Rp699,43 triliun dengan realisasi per 11 Juni 2021 sebesar Rp219,65 triliun (31,14 persen).

### Titik Kritis

Peningkatan jumlah Covid-19 terkonfirmasi hingga mencapai 1.919.547 kasus dalam waktu setahun menunjukkan kenyataan bahwa upaya penanganan Covid-19 pada sektor Kesehatan dapat dinilai kurang efektif. Permasalahan yang menjadi penyebab kurang efektifnya penanganan Covid-19 diantaranya adalah upaya edukasi dan sosialisasi promosi kesehatan oleh Kemenkes belum mampu mengubah perilaku masyarakat; penetapan PSBB belum mampu menekan jumlah kasus dan penyebaran Covid-19; dan terdapat keterlambatan perekrutan SDM untuk melakukan tracing (pelacakan kasus) selama 7 bulan sejak Pemerintah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional.

Selain itu, kebijakan pembatasan mobilitas sosial menimbulkan konsekuensi terganggunya aktivitas ekonomi, baik terhambatnya investasi dan ekspor-impor maupun pada sektor informal yang banyak menyerap tenaga kerja sehingga berimplikasi pada menurunnya konsumsi rumah tangga, serta kontraksi pada pertumbuhan ekonomi. Tentunya hal tersebut menimbulkan permasalahan sosial diantaranya berupa tingkat pengangguran yang bertambah dan peningkatan jumlah masyarakat miskin (perbandingan *year on year* 2018-2020).



Meskipun pemerintah melalui PC-PEN telah berupaya memperluas ruang aktivitas investasi dan ekspor-impor melalui perubahan regulasi terkait optimalisasi penggunaan modalitas dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional, namun faktanya pada tahun 2020 terdapat penurunan 2,4% secara *year on year* (yoy) dari nilai Rp423,1 triliun ditahun 2019 menjadi Rp412,8 triliun ditahun 2020 pada sektor investasi dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA). Begitu pula ekspor yang menurun sebanyak 2,6% yoy dari USD167,7 miliar ditahun 2019 menjadi USD163,3 miliar ditahun 2020).

Namun kenyataannya, masih ditemukan berbagai permasalahan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada program PC-PEN ditahun 2020, diantaranya:

1. Terdapat ketidakefektifan dalam perencanaan dan penganggaran program PC-PEN pada sejumlah Kementerian/Lembaga yang berakibat pada risiko atau kegagalan program di masa mendatang.
2. Terdapat permasalahan atas kewajaran harga Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk program PC-PEN seperti nilai pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) yang lebih tinggi dari harga wajar pada program Relawan Penanganan Covid-19 dibawah Kemendikbud.

3. Ketidakandalan Basis data yang ditemukan pada hampir seluruh bantuan sosial PC-PEN sehingga berdampak pada penyaluran bansos menjadi tidak tepat sasaran.
4. Koordinasi kebijakan antar Kementerian/Lembaga/Pemda PC-PEN dinilai belum berjalan dengan baik terutama pada pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

### Pembuat Kebijakan Harus Melakukan Apa?

- Penanganan Covid-19 terhadap permasalahan kesehatan merupakan permasalahan kunci yang harus mendapatkan prioritas utama dalam penyelesaiannya disertai dukungan data yang lebih akurat dan komprehensif serta terintegrasi pada satu sistem informasi, terutama terkait *Testing dan Tracing*.
- Langkah-langkah pemulihan ekonomi nasional sejatinya tidak berhenti pada tujuan jangka pendek dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi semata, terutama pada program bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi. Namun perlu diikuti usaha optimal Pemerintah melakukan harmonisasi kebijakan dan sosialisasi yang lebih baik untuk memberikan kenyamanan dan kepastian investasi kepada para investor dan eksportir, sehingga dapat meredam peningkatan tingkat pengangguran dan kemiskinan.
- Akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, terutama pada tata kelola Program PC-PEN yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemda maupun APIP dimasa pandemi harus dibarengi kepekaan atas situasi krisis (*sense of crisis*).

### Referensi

BKPM RI. 2021. Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA Triwulan IV Januari dan Desember 2020. Jakarta: BKPM.

BPK RI. 2021. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) Tahun 2020*. Jakarta.

BPS. 2021. "Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Desember 2020". *Berita Resmi Statistik*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/> pada 17 Juni 2021.

..... "Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Persen) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen)". *Publikasi*. Diakses dari <http://www.bps.go.id/> pada 15 Juni 2021.

Kemenkes. 2021. *Dashboard Covid-19*. Diakses dari <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/> pada 15 Juni 2021

Simanullang, Selamat. 2021. "Evaluasi Program PC-PEN Tahun 2020: Gambaran Umum Pengawasan BPKP". *Paparan Diskusi*. Jakarta